KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
SEPTI ERMAWATI
11360059

PEMBIMBING :
Dr. FATHORRAHMAN S.Ag., M.Si

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Politik perempuan selalu menjadi problematika kebangsaan yang selalu menjadi perbincangan hangat di republik ini. Karena perempuan selalu dimarginalkan terutama pada wilayah struktural yaitu dengan adanya badan otonom khusus perempuan, sementara peran peran perempuan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia. Persoalan mengenai hak perempuan dalam berkiprah di dunia politik menjadi masalah yang kontroversial, terutama dalam hal perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Pada sisi lain kenyataan objektif akan adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat dan memiliki persyaratan objektif di dalam masyarakat menjadi fakta bahwa perempuan memiliki peluang dan pengaruh besar di dalam masyarakat.

Dari persoalan diatas kajian ini juga dilakukan guna menemukan bagaimana pandangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kepemimpinan perempuan serta menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi pemikiran dalam persamaan dan perbedaan pendapat politik kedua partai mengenai kepemimpinan perempuan.

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan atau *library research*, yaitu melakukan kajian yang merujuk pada data-data yang ada pada referensi. kemudian menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif PKB dan PKS. Sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif dengan menggunakan pendekatan normative.

Dalam pandangan PKB bolehnya perempuan menjadi kepala negara berpatokan pada dua pendekatan yaitu melalui pendekatan rujukan dalil-dalil dari nas-nas al-Qur'an maupun hadist serta pendapat-pendapat para ahli ijtihad. Dan yang kedua adalah melalui sudut pandang dari pemahaman inti dan substansi demokrasi dan persamaan hak menurut doktrin-doktrin hukum konvensional atau kesepakatan-kepsepakatan di luar Islam yang betujuan untuk mengatur hajat hidup orang banyak yang dalam konteks Indonesia tercover dalam pancasila. Sementara itu, PKS secara terang-terangan mengharamkan perempuan menjadi kepala negara, karena ideologi yang digunakan adalah syariat Islam. Namun disisi lain, kedua partai tersebut sama-sama membolehkan perempuan untuk ikut berperan aktif dalam ranah perpolitikan. Sedangkan Perbedaan antara kedua partai ini ialah pola pemahaman syari'at dari elit-elit kedua partai, faktor sejarah, latar belakang pendidikan dari para elit partai serta perbedaan kondisi sosial budaya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Septi Ermawati

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septi Ermawati

NIM : 11360059

Judul :**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2015

Pembimbing I

DR. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si

NIP: 19760820 200501 1 005

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/13/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Septi Ermawati
NIM	: 11360059
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 15 Juni 2015
Nilai	: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH
Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP: 19760820 200501 1 005

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
NIP 19800908 201101 1 005

Penguji III

Fuad Mustafid, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 15 Juni 2015
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
ح	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda/Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

b. Vokal rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatḥah dan ya	Ai	a-i
و	Fatḥah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa* حول ---- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fatḥah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	î	I dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla* قيل ---- *qīla*

ر مي ---- *ramā* يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta marbūṭah

a. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".

b. Transliterasi "mati adalah "h".

c. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisa, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan"h".

Contoh :

روضة الاطفال ------- *rauḍhah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ------- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحت ------- *Ṭalḥatu atau Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *syaddah* dan *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau akhir kata.

Contoh :

نلزّل -------- *nazzala*

البر -------- *al-biru*

5. **Kata Sandang "ال"**

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika berteu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

6. **Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

و ما محمد الا رسول -------- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septi Ermawati

NIM : 11360059

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul skripsi : Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Keadilan Sejahtera

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 5A69BADF195005762 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Septi Ermawati

NIM. 11360059

MOTTO

"Berangkat Dengan Penuh Keyakinan

Berjalan Dengan Penuh Keikhlasan

Istiqomah Dalam Menghadapi Cobaan"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk :
Ayahku (Bpk Irfanudin) & Ibuku (Ibu Ma'idah), Adikku (David Ardiansyah)
Suamiku (Ahmad Yani) yang selalu mendampingiku
Guru-guru ku,
Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan,
Serta orang yang haus akan ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله, الصّلاة والسّلام على رسول الله, سيّد الأنبياء و المرسلين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),** dengan berbagai ujian dan tantangan, namun tetap bisa diselesaikan dengan keyakinan bahwa setiap suatu tanggung jawab pasti ada solusi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.S.I., selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing skripsi ini.

4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekertaris Jurusan Perbandingan Mahzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen berserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
6. Kepada keluargaku tercinta, bapak dan ibu (Irfanuddin dan Ma'idah), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiel selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini, serta adikku terkasih (David Ardiansyah).
7. Suamiku (Ahmad Yani), terimakasih untuk selama ini atas waktu dan kesabarannya.
8. Teman-teman PMH 2011 (Khotim, Angga, Rif'ah, Dina, Toher, Monce, Resky, Eko, dll) yang sudah mewarnai hari-hari selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
9. Korp KOPI PMII Rayon Syari'ah dan Hukum atas pengalaman keorganisasian yang akan berguna sampe tua nanti.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Juni 2015

Penyusun,

Septi Ermawati
NIM. 11360059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI….....……....…iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI x
HALAMAN MOTTO xi
HALAMAN PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Pokok Masalah.....10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teoritik 13

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II PANDANGAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Profil PKB. 22

1. Proses Pembentukan Partai.....22

2. Landasan Perjuangan (*Mabda' Siyasy*).....26

B. Kedudukan Perempuan Dalam Politik Menurut PKB 32

C. Pandangan PKB Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....36

BAB III PANDANGAN POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Profil PKS.....41

1. Proses Pembentukan Partai.....41

2. Peran dan Tugas Perrempuan.....46

B. Pandangan PKS Tentang Politik Perempuan.....47

C. Pandangan PKS Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....52

BAB IV ANALISIS PANDANGAN PKB DAN PKS TERHADAP KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

A. Analisis Pandangan PKB Mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan.....55

B. Analisis Pandangan PKS Mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan.....69

C. Persamaan dan Perbedaan.....74

D. Relevansi Terhadap Kondisi Perpolitikan di Indonesia.....79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran-saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pada hakekatnya adalah penguasaan dan pengambilan keputusan yang lingkupnya dimulai dari institusi keluarga sampai ke institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik secara luas mencakup masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari pada kenyataanya selalu melibatkan perempuan. Pendidikan politik dengan demikian harus dimulai sejak dalam keluarga.[1]

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang masih sulit dibayangkan, terutama untuk negara berkembang. Hal ini disebabkan manusia telah dibentuk oleh budayanya masing-masing dengan menekankan bahwa kedudukanya berkisar pada lingkungan keluarga, seperti mengurusi anak, suami, memasak dan lain sebagainya.[2] Anggapan ini masih melekat di kalangan masyarakat terutama pada masyarakat yang berstruktur patriarki.

Selama ini, ada kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik, bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya. Akibatnya, di belahan dunia mana pun jumlah

---

[1] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia),* (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), hlm. 23.

[2] Ihromi. T.O. (penyunting), *Kajian perempuan dalam pembangunan,* (Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia, 1995), hlm. 428.

perempuan yang terjun didunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya cukup tinggi.

Minimnya partisipasi perempuan di sektor publik adalah salah satu problem yang berasal dari kekurangsadaran politik bagi perempuan. Berbagai kendala perempuan untuk sukses berkecimpung di wilayah politik masih sangat sulit diatasi. Persepsi masyarakat bahwa politik adalah keras dan hanya layak untuk laki-laki masih sangat kental serta maskulinitas menempatkan laki-laki sebagai pusat segala kekuasaan yang dominan disamping mensubordinasikan perempuan sehingga terjadi kegamangan di kalangan mereka untuk berusaha terlibat didalamnya.

Persamaan hak dan kewajiban politik antara laki-laki dan perempuan secara yuridis formal adalah sama. Tidak ada halangan perempuan memangku jabatan politik pada semua lini kekuasaan namun realita menunjukan, secara kualitas kaum laki-laki, hanya beberapa persen saja yang mampu mengisi job-job strategis.[3]

Era reformasi dan demokratisasi yang menekankan perlunya pemberlakuan otonomi daerah merupakan momentum penting bagi perempuan. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif menentukan wujud demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju terbangunya *civil society* (masyarakat madani) yang kuat. *Civil society* adalah seluruh unsur yang tergabung

[3] Said Aqil Siraj, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri*. Jauhar Hatta (ed.) (Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 21.

dalam masyarakakat, termasuk kaum perempuan. Tidak ada *civil society* tanpa keikutsertaan perempuan. Demikian pula tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan di dalamnya. Membangun *civil society* berarti memperjuangkan ruang publik di mana semua warga negara dapat mengembangkan kepribadian, potensi, dan memberi peluang bagi pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya, dalam rangka membangun *civil society* yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, perempuan merupakan kelompok strategis dan partisipasinya merupakan komponen kunci dalam membangun demokrasi.[4]

Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat-sifat feminim. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Penguasa harus selalu menampakkan ketegaran, kekuatan dan pengaruh yang besar. Herannya bukan hanya masyarakat yang tidak memberikan atribut kekuasaan kepada perempuan, melainkan juga perempuan itu sendiri. Perempuan akhirnya harus menjadi maskulin jika ingin berkuasa. Perempuan harus dapat mengeliminasi aspek lemah lembut dalam dirinya untuk disebut sebagai kuat, tegar dan berpengaruh. Kondisi seperti ini menjadi isu gerakan feminisme pada era 1970an.[5]

Sekarang, zaman telah berubah. Ciri kekuasaan tidak harus bertolak belakang dengan sifat-sifat feminim, seperti lemah lembut, mengalah, dan memberikan pujian. Perempuan tidak lagi dipaksa untuk

---

[4] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan,* hlm. 172.

[5] *Ibid*., hlm. 37.

mengabaikan feminitas mereka dan mendorong mereka untuk bersikap seperti laki-laki. Sebaliknya mereka mengagung-agungkan kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik dan bisnis sehingga pada akhirnya laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing.

Reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan besar bagi kaum perempuan yang selama 32 tahun terpasung hak politiknya. Gerakan-gerakan perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai energi, muncul dengan memberdayakan hak-hak perempuan, khususnya hak politik, dalam rangka mengentaskan perempuan dari kubangan politik yang destruktif. Namun era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif. Kondisi peran perempuan menjadi sangat buruk bila melihat realitas politik tingkat massa, dimana perempuan tidak lebih sebagai objek politik. Mereka tidak saja menjadi objek politik, tetapi mereka juga apatis terhadap nasib kaumnya. Politik didefinisikan dalam arti laki-laki, yakni sebuah dunia dengan sistem *zero sum game.*[6]

Dari fakta-fakta sejarah kita memperoleh gambaran yang menarik perhatian yang berhubungan dengan kedudukan dan peran perempuan di Indonesia. Perempuan Indonesia ternyata bisa memperoleh kedudukan, wewenang dan kekuasaan tertinggi sebagai kepala Negara. Di samping itu,

[6] Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar", dalam Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. Vii.

mereka juga telah berkiprah di berbagai bidang yang sering dianggap dunia laki-laki. Hal ini bertentangan sekali dengan gambaran umum yang ada tentang masyarakat Indonesia di mana kaum perempuan yang dibedakan dari kaum laki-laki mempunyai kedudukan yang rendah dan hidup terkekang, mereka seolah-olah tidak mempunyai ruang untuk berkembang.

Gambaran semacam ini jelas terungkap oleh R.A. Kartini. Ungkapan-ungkapan umum untuk menggambarkan citra perempuan sebagai manusia sekunder atau nomor dua banyak kita dengar. Perempuan sebagai *konco wingking* (dalam ungkapan bahasa Jawa berarti teman belakang) merupakan pihak yang harus diatur dan dilindungi. Tambahan laki-laki sebagai kepala rumah tangga perempuan sebagai pengatur rumah tangga, kedudukan perempuan dalam keluarga yang katanya kodratnya sebagai istri dan ibu oleh masyarakat diharuskan tinggal di rumah (wilayah domestik) yang diatur oleh laki-laki yang berkiprah di luar (wilayah domestik). Ungkapan-ungkapan itu menunjukkan kedudukan perempuan yang inferior bila dibandingkan dengan laki-laki, perempuan merupakan subordinasi laki-laki.[7]

Namun kenyataan, terdapat banyak bukti bahwa di masa lalu kaum perempuan Indonesia pernah menjabat pimpinan sebagai kepala Negara dan juga berperan aktif dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan militer. Sumber tertua yang bisa diperoleh dari

[7] Jumari Ismanto, *Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, cet. I, (Surabaya: PT Bima Ilmu Offest, 1982), hlm. 27.

sejarah Indonesia adalah dari abad ke-7 M. Pada tahun 674 M menurut catatan orang Cina, rakyat kerajaan Holing (yang dimaksud adalah kalijaga Jawa Tengah) menobatkan perempuan sebagai ratu dengan gelar ratu His-Mo (sima).[8]

Kepemimpinan sesungguhnya telah berubah, tugas seorang hakim atau kepala negara misalnya, bukan lagi seperti Nabi, Raja, Imam atau Khalifah yang mempunyai kekuasaan tunggal dan mutlak atas ilmu dan pengetahuan, atas hubungan dengan Tuhan, atas pemerintahan, kehakiman, dan sebagainya. Kekuasaan dalam sistem Negara modern telah berbagi-bagi dalam beberapa instansi pemerintahan, dan ditambah dengan adanya undang-undang yang menyamakan semua manusia tanpa melihat kepada kelas sosial, jenis kelamin dan keyakinan.[9]

Dalam Islam banyak sekali pendapat tentang kepemimpinan perempuan. Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini. Menurut Asy-Syiba'i meskipun tidak ada larangan dalam Islam, tetapi keburukan lebih besar daripada manfaatnya. Perempuan dalam pergaulannya dengan laki-laki (yang bukan muhrimnya) di lembaga-lembaga sosial politik itu hanya mengundang fitnah yang akibatnya bisa merusak kehidupan rumah tangga. Jikalau memang peran publik bagi perempuan tetap dipegang sedang dia mempunyai tugas domestik (rumah tangga) yang tidak boleh ditinggal maka dia mempunyai dua peran yang

---

[8] Nawal Al-Sa'dawi, *Perempuan Agama dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 33.

[9] *Ibid.,* hlm. 34.

harus dipertanggungjawabkan, dan apakah perempuan dapat maksimal dengan peran ganda tersebut. Bisa-bisa salah satu dari tugas atau malah kedua tugas tersebut menjadi berantakan. Oleh karena itu banyak sekali mudharatnya, jika pemimpin suatu negara dijabat oleh perempuan dibandingkan bila dijabat oleh laki-laki. Hal ini akan bertolak belakang dengan fungsi tugas manusia yang harus mencegah kerusakan di muka bumi.

Yusuf Qardhawi dalam fatwa-fatwanya mengatakan ayat yang menyebut kepemimpinan laki-laki itu adalah konteks kehidupan rumah tangga, maka laki-laki itulah pemimpin keluarga, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap pemimpinnya.[10] Dengan demikian perempuan boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini berlaku sepanjang masa. Di dalam fatwanya Yusuf Qardhawi menyatakan dalam menanggapi pro dan kontra perihal perempuan yang menduduki jabatan memimpin tertinggi negara bahwa perempuan boleh menduduki wilayah tertinggi negara yaitu MPR *(Ahlu al-halli wa al-'Aqdi),* hal lain yang memperkuat terhadap kebolehan perempuan menduduki jabatan tinggi negara

و ا لمؤ منو ن و المؤ منا ت بعضهم أو لياء بعض يأ مرو ن بالمعر و ف و ينهون عن المنكر ...[11]

[10] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* Terjemah As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 528.

[11] At-Taubah (9) : 71

Dalam ayat tersebut, Allah mempergunakan kata *auliya'* (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan pihak laki-laki saja, tetapi keduanya secara bersamaan berdasarkan ini perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu memenuhi kriteria menjadi pemimpin. Kata *auliya'* mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan yang terkandung dalam fase *"menyuruh kepada yang ma'ruf"* mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan termasuk memberikan kritik atau nasehat kepada penguasa, sehingga setiap laki-laki maupun perempuan sama derajatnya.[12] Perempuan sebagai adalah *saqiq ar-rijal* (saudara laki-laki sekandung), sehingga kedudukan serta haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin. Perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu itu memiliki kelebihan daripada yang lain.[13]

Di Indonesia sendiri kiprah perempuan di bidang politik terbuka selebar-lebarnya. Perempuan bebas berkecimpung di dunia politik sesuai yang mereka kehendaki. Akan tetapi untuk menjadi pemimpin atau kepala negara, peran perempuan dibatasi oleh aturan-aturan partai yang mengusung mereka. Dalam penilitian ini, penyusun akan mengambil dua partai besar di Indonesia yang sama-sama bermassa muslim, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya akan ditulis PKB dan Partai

---

[12] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 315.

[13] *Ibid*., hlm 317.

Keadilan Sejahtera yang kemudian ditulis PKS. Kedua partai ini dilatar-belakangi oleh Islam, sama-sama berangkat dari Islam. Akan tetapi ada perbedaan yang signifikan antara kedua partai ini dalam memandang perempuan sebagai pemimpin atau kepala negara.

PKB adalah salah satu partai politik di Indonesia yang bermassa Islam. Kerangka umum yang dijadikan patokan oleh PKB sebagai azas adalah Pancasila. Di mana Pancasila merupakan landasan berpikir dalam mengambil setiap langkah kebijakan. Hal inilah yang melandasi pola pemahaman terhadap persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka besar ini, sebenarnya tidak ada permasalahan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, semua sama. Dalam bidang apa pun perempuan dan laki-laki adalah sama. Pemahaman ini diserap betul oleh PKB sebagai pijakan dasar dalam melangkah, sehingga frame ini membutuhkan pendefinisian yang teruai dan jelas agar dapat diterapkan ke dalam sebuah sendi-sendi dan aktifitas partai.

Sedangkan PKS, yang menamakan dirinya sebagai partai dakwah dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam dalam mengambil berbagai kebijakan dalam internal partai, memandang jika perempuan dan kepemimpinan adalah dua hal yang sangat sulit dibayangkan. Hal ini mengingat bahwa azas yang digunakan oleh PKS adalah syari'at Islam, yang di mana partai ini sangat tekstual dalam menghadapi masalah-masalah yang kontemporer.

Dari uraian di atas, memberikan daya tarik tersendiri untuk dilakukan penelitian bagaimana kedua partai yang sama-sama partai Islam akan tetapi memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemimpinan perempuan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diambil beberapa masalah yang sesuai untuk diangkat menjadi pokok masalah. Yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan politik kedua partai mengenai kepemimpinan perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Menjelaskan pandangan politik PKB dan PKS mengenai kepemimpinan politik perempuan
   b. Menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan pandangan politik PKB dan PKS tentang kepemimpinan perempuan
2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai khasanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran, khususnya dalam memahami realitas politik perempuan atau kepemimpinan perempuan.
b. Kegunaan yang bersifat praktis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para aktifis politik perempuan dalam agenda memperjuangkan dan meningkatkan peran politik perempuan di Indonesia, serta sebagai bahan masukan bagi partai politik Islam dalam menyikapi isu politik perempuan.

D. Telaah Pustaka

Mengenai politik atau kepemimpinan perempuan sudah banyak yang melakukan penelitian. Akan tetapi menurut pengamatan penyusun masih belum ada peneliti yang menelaah tentang kepemimpinan politik perempuan studi komparasi pandangan PKB dan PKS.

Saiful Waris dalam skripsinya yang berjudul *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*, menjelaskan tentang bagaimana pendapat NU dan Muhammadiyah mengenai kepemimpinan politik perempuan. Dimana kedua organisasi ini membolehkan kepemimpinan perempuan, akan tetapi ada batasan-batasan tersendiri atau syarat-syarat tertentu yang akan menjadikan perbedaan pendapat antara kedua organisasi tersebut.

Sulaiman dalam skripsinya yang berjudul, *Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Amina Wadud Dan Siti Musdah Mulia,* menyatakan

bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan hak-hak yang sama dan semua harus diberi kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Seorang perempuan bebas memilih pekerjaan apa saja yang ia inginkan.

Tri Mas Ulah dalam skripsinya yang berjudul *Aktifitas Perempuan Dalam Bidang Politik (Studi Terhadap Pandangan Abu Al-A'la Al Maududi)*, menjelaskan ketidaksetujuan Maududi atas partisipasi politik perempuan. Menurut Maududi, perempuan tempatnya adalah di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, laki-laki lebih kuat secara fisik dan psikologinya dengan mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 34. Dijelaskan juga bahwa menurut Maududi persamaan antara laki-laki dan perempuan adalah paham sekuler dan itu berasal dari Barat dan harus ditolak, sampai Maududi menyatakan bahwa mencalonkan perempuan dalam pemilu bertentangan dengan semangat Islam.

Tuti Alawiyah dalam skripsinya yang berjudul *Keterlibatan Para Tokoh Muslimat NU Cab. Indramayu Dalam PKB (Studi Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Politik),* menerangkan bahwa para tokoh Muslimat NU Cabang Indramayu yang melibatkan dirinya dalam wilayah politik adalah mereka yang sepakat dengan ulama' yang membolehkan politik perempuan. Keterlibatan secara individual tokoh Muslimat NU Cabang Indramayu ini untuk mewujudkan hak politik yang mereka miliki dan menunjukan kemampuan mereka untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki.

Sejauh pengamatan penyusun, tulisan tentang kepemimpinan politik perempuan memang telah banyak ditulis dalam skripsi, akan tetapi secara khusus membahas tentang kepemimpinan politik perempuan menurut pandangan PKB dan PKS masih belum ada, maka dari titik inilah penyusun menganggap sangat tepat untuk melakukan pengkajian dan penelaahan lebih mendalam tentang masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan. Untuk berbagai usaha dan kegiatannya diperlukan upaya yang terencana dan sistematis dalam melatih dan mempersiapkan pemimpin baru. Oleh karena itu, banyak studi dan penelitian dilakukan orang untuk mempelajari masalah pemimpin dan kepemimpinan yang menghasilkan berbagai teori tentang kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan pemimpin, sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi kepemimpinan.

Kepemimpinan muncul bersamaan dengan peradaban manusia sejak jaman dahulu di mana orang-orang berkumpul bersama dan bekerja bersama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Sejak itulah terjadinya kerja sama antar manusia di dunia dan munculnya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi

perilaku yang menjadi panutan interaksi antar pemimpin dan pengikut serta pencapaian tujuan yang lebih riil dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan terhadap budaya organisasi yang lebih maju.

Dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah "pribadi", tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga. Oleh karena itu yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan yang bersandar pada nila-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan dan kedamaian.

Peran publik perempuan Indonesia di wilayah perpolitikan negara masih banyak mengalami hambatan bahkan tak jarang fenomena yang ada terlihat bahwa minimnya peran, sekalipun telah dibuka lebar-lebar kran demokrasi. Akan tetapi hal tersebut tak bisa lepas dari faktor-faktor yang melingkupinya, yaitu faktor dominasi agama sosial dan budaya. Banyaknya persoalan yang menyelimuti rendahnya partisipasi politik perempuan tidak murni timbul dari perempuan itu sendiri. Melainkan lebih disebabkan oleh faktor pendiskreditan dalam konstruksi sosial yang banyak turut menambah pengukuhan ketidakaktifan perempuan.

Kekuasaan sebagai unsur paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat-sifat feminim. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Penguasa harus selalu menampakkan ketegaran,

kekuatan dan pengaruh yang besar. Herannya bukan hanya masyarakat yang tidak memberikan atribut kekuasaan kepada perempuan, melainkan juga perempuan itu sendiri. Perempuan akhirnya harus menjadi maskulin jika ingin berkuasa. Perempuan harus dapat mengeliminasi aspek lemah lembut dalam dirinya untuk disebut sebagai kuat, tegar dan berpengaruh. Kondisi seperti ini menjadi isu gerakan feminisme pada era 1970an. Kaum perempuan lalu berupaya menganut kekuasaaan model laki-laki dengan menyingkirkan ciri feminim karena dianggap kurang pantas.[14]

Dalam pandangan mayoritas ahli fiqh konservatif selama ini peran politik dalam arti *amar ma'ruf nahi mungkar*, laki-laki dan perempuan memang diakui memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi, dalam arti politik praktis yang di dalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim), dalam lembaga legislatif dan eksekutif atau kekuasaan besar atau publik. Tugas-tugas ini, menurut kebanyakan ulama, tidak dapat diperlakukan secara sama. Seperti halnya yang dikeluarkannya oleh Universitas Al-Azhar tahun 1952 tentang masalah perempuan bahwa syari'at Islam melarang menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan umum (publik). Maksudnya kekuasaan yang berbentuk pemutusan atau pemaksaan dalam urusan kemasyarakatan, seperti kekuasaan membuat undang-undang *(legislatif),* kekuasaan kehakiman *(yudikatif)*, dan kekuasaan melaksanakan undang-undang

[14] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan,* hlm. 37.

(eksekutif).[15] Ini menunjukka bahwa bentuk peranan perempuan pada sektor publik apa pun, perempuan tidak dapat menjadi pemimpin.

Di dalam surat an-Naml:

قا لوا نحن وأو لو قو ة وأولو بأس شد يد والأمر إليك فا نظر ي ماذا تأ مر ين, قالت إن الملو ك إذا دخلوا قرية أفسدو ها و جعلوا أعزة أهلها أذلة و كذ لك يفعلو ن،[16]

Disebutkan, Ratu Bilqis sebagai pemimpin telah mencoba untuk menjalankan fungsi instruktif. Namun keputusan yang diperintahkan tidak berisi tentang apa dan bagaimana bilamana kegiatan ini dilaksanakan, maka terlihat prosesnya mengalami hambatan. Oleh karena itu para menterinya mmenolak berpartisipasi dan menetapkan keputusan dan sebaliknya malah menyerahkan kembali kepada pemimpinnya untuk membuat keputusan, kemudian memohon agar keputusan itu diperintahkan dan untuk dilaksanakannya.[17]

Maka dari itu tidak ada alasan terhadap pelarangan bagi perempuan untuk menduduki jabatan pemimpin negara. Menurut para ulama yang membolehkan, bahwa derajat manusia adalah sama di muka Allah, yang membedakan adalah ketaqwaan seseorang. Akan tetapi dalam masalah ibadah dan mu'amalah peran serta status dibagi menurut porsi masing-masing karena melihat faktor kodrati yaitu kelamin, yang mengharuskan perempuan dan laki-laki mempunyai peran sendiri-sendiri.

---

[15] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 141.

[16] An-Naml (27) : 33-34.

[17] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm.146.

Pada persoalan kepemimpinan selain sektor rumah tangga perempuan berhak pula dan bahkan sama posisinya dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin negara. Karena mereka semua bertugas menjadi penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Sebagaimana yang diketahui, Indonesia pernah memiliki seorang presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri adalah satu-satunya perempuan yang pernah menjabat sebagai kepala negara Indonesia. Megawati adalah presiden kelima Republik Indonesia. Berpenampilan tenang dan tampak acuh dalam menghadapi persoalan. Tetapi dalam hal-hal tertentu Megawati memiliki determinasi dalam kepemimpinannya, misalnya mengenai persoalan di BPPN, kenaikan harga BBM dan pemberlakuan darurat militer di Aceh Nanggroe Darussalam.

Megawati lebih menonjolkan kepemimpinan dalam budaya ketimuran. Ia cukup lama dalam menimbang-nimbang sesuatu keputusan yang akan diambilnya. Tetapi begitu keputusan itu diambil, tidak akan berubah lagi. Gaya kepemimpinan seperti itu bukanlah suatu kelemahan. Seperti dikatakan oleh Frans Seda: "Dia punya intuisi tajam. Sering kita berpikir, secara logika, menganalisa fakta-fakta, menyodorkan bukti-bukti, tapi tetap saja belum pas. Di saat itulah Mega bertindak berdasarkan intuisinya, yang oleh orang-orang lain tidak terpikirkan sebelumnya." Cukup demokratis, tapi pribadi Megawati dinilai tertutup dan cepat

emosional. Ia alergi pada kritik. Komunikasinya didominasi oleh keluhan dan uneg-uneg, nyaris tidak pernah menyentuh visi misi pemerintahannya.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*,[18] yaitu kajian yang merujuk kepada data-data yang ada pada referensi. Dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif PKB dan PKS.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu penyusun berusaha menggambarkan dan menganalisa secara cermat tentang kepemimpinan politik perempuan menurut Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan pendapat-pendapat mengenai kepemimpinan politik perempuan antara kedua partai tersebut. Dengan cara perbandingan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan beserta

[18] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Vii, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

kelebihan dan kekurangan masing-masing agar ditemukan pemahaman yang tepat.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana aturan-aturan kedua partai dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau kepala negara.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *pertama,* data primer, adalah data-data yang berhubungan dengan konsep tentang kepemimpinan politik perempuan menurut pandangan PKB dan PKS. Data primer ini diambil dari beberapa sumber, baik dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kedua partai ataupun landasan perjuangan kedua partai.

Kedua, data sekunder, yaitu data-data yang ada kaitannya dengan tema pembahasan yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dokumen, artikel, koran dan yang lainnya.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah studi pustaka *(library research)* yaitu dengan menggali dari referensi-referensi yang ada dengan melihat relefansi terhadap permasalahan yang diangkat.

Data yang dicari berbentuk buku-buku, makalah-makalah, dokumen, kertas disposisi, maupun diktat-diktat hasil dari kajian-

kajian internal PKB dan PKS itu sendiri. Data juga berasal dari koran, majalah serta tabloit.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini kedepannya.

Bab *kedua*, pada bab ini akan membahas tentang pandangan politik PKB mengenai kepemimpinan perempuan.

Bab *ketiga,* di bab ini membahas tentang pandangan politik PKS mengenai kepemimpinan perempuan.

Bab *keempat,* berisi analisis pandangan PKB dan PKS yang berkenaan dari segi-segi persamaan dan perbedaan antara kedua partai tentang kepemimpinan politik perempuan dalam kerangka perbandingan *(komparatif)*, sehingga dari ulasan diharapkan akan ada kejelasan bagaimana kedua partai memandang mengenai kepemimpinan politik perempuan.

Bab *kelima,* sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban

terhadap persoalan yang dikaji, serta saran-saran yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan menurut PKB dan PKS boleh menjadi anggota parlemen berdasarkan pada Surat At-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar* bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Namun pada kesimpulan akhir PKS melarang bahkan mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin atau kepala negara. Menurut PKS jabatan kepala Negara dalam wacana hukum Islam termasuk *walayah kamilah* (kepemimpinan penuh) yang meliputi kepemimpinan agama dan kepemimpinan militer. Oleh karena itu partai ini mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin (kepala negara).

Berbeda dengan PKB yang membolehkan perempuan menjadi kepala negara dengan alasan bahwa sesungguhnya untuk menjadi pemimpin itu bukanlah masalah perempuan atau laki-laki, tetapi apakah pemimpin tersebut mampu menegakkan sendi-sendi keadilan dan juga didukung oleh rakyat. Berkaitan dengan masalah kebolehan perempuan menjadi pemimpin maka yang terpenting adalah menjalankan amanat kemanusiaannya sebagaimana posisi jabatannya yang harus mampu memenuhi serta melaksanakan tugas sebagai pemimpin, yang tidak lain tidak bukan adalah untuk mengakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu *kaidah kulliyah* bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, sehingga apa yang telah dipaparkan oleh PKB dan PKS terdapat perbedaan dalam pensikapan terhadap kepemimpinan politik perempuan dan ijtihad yang kedua partai pergunakan. Sehingga kepemimpinan perempuan pada saat ini tidak menjadi masalah selama permpuan tersebut memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab.

B. Saran

Kepemimpinan politik perempuan di Indonesia masih menjadi hal yang tabu meskipun Megawati Soekarno Putri juga pernah menjabat sebagai Presiden. Partai politik yang menjadi wadah untuk perpolitikan Indonesia agaknya masih membatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi dalam bidang politik, meskipun jelas terdapat banyak partai politik yng membolehkan perempuan sebagai kepala negara. Akan tetapi tetap saja masih banyak peraturan-peraturan dari internal partai politik yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, perempuan masih dianggap lemah. Sekarang ini sudah banyak wacana-wacana mengenai kesetaraan gender, seharusnya partai politik juga lebih memperhatikan perempuan agar perempuan lebih bisa bebas berekspresi dalam kancah politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an,Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat,* Bandung : Mizan, 1997.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Sahih Bukhari,* VI jilid, juz 5, Bairut.

Ilyas, Hamim dkk. (ed.), *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis,* cet. 1, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Sa'dawi, Nawal, *Perempuan Agama dan Moralitas*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam : Study Atas Pemikiran Gus Dur,* cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2002.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Dalam Islam,* Yogyakarta: UGM Press, 1993

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terjemah As'ad Yasin Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Siraj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan, Fiqh Demokratik Kaum Santri,* Jauhar Hatta (ed) Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Al-Raef, Zaini Shofari dan Andri Taufiq H. (ed), *Membangun Demokrasi* , cet. 1 Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1999.

Anam, Khoirul, *Kontroversi Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Yogyakarta: MU:3, 2012.

Fellard, Andree Feillard. *NU vis a vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Terjemah Lesmana, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Hasim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam,* Bandung : Mizan, 2001.

Hassan, Sahar L.(ed), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Ismanto, Jumari, *Peran Perempuan dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, cet. I, Surabaya: PT Bima Ilmu Offest, 1982.

Junaedi, Dedi (lay out), *Beyond The Simbolis, Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Bandung: ROSDA, 2000.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Vii, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Masdar, Umarudin *, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mastuki HS, MA (ed.), *Kiai Menggugat Mengadili Pemikiran Said Aqil Siraj*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

MD, Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mulia, Siti Musdah, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia),* Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

Simanjuntak, Payaman J., M. Fajrul Falakh, Imam Anshori Saleh, *Gus Dur Sang Rekonsilitator*, Jakarta: HIPSMI, 2000.

Suaedy, Ahmad (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

T.O, Ihromi (penyunting), *Kajian perempuan dalam pembangunan,* Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia, 1995.

Utami, Tari Siwi, *Perempuan Politik di Parlemen*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

E. Lain-Lain

Alfiaturrahmaniah, Siti, "Peran, Wacana dan Eksistensi PPKB Dalam Konstelalasi PKB", makalah, Jepara, Ahad 18 Maret 2001.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB

Faizin, Nur, *Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi Terhadap Partai Keadilan Sejahtera DIY Pasca Pemilu 2004)* , Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Garis *Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PKB, 1998- 1999.

Kebangsaan, Media Advokasi Edisi IV September 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT Persero Balai Pustaka, 1999.

Miftakhuddin, "*Islam dan Presiden Perempuan Studi Perbandingan Antara Sikap Mendukung Presiden Perempuan di Kalangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU"* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

"Peran dan fungsi PPKB", *Makalah*, Semarang, Sabtu, 28 Oktober 2000.

http://www.dpp.pkb.or.id

http://www.kebangkitanbangsa.org

http://www.PK-Sejahtera.org

http://www.pks.or.id

Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	hlm	Fn	Terjemahan
			BAB I
1	7	11	*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabikjaksana.*
			BAB II
2	39	34	*Dan hendaklan diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*
			BAB IV
3	58	55	*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepeada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.*
4	71	75	*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan memimpin urusan mereka.*

Lampiran II

CURICULUM VITAE

Nama : Septi Ermawati
Tempat/tgl lahir : Temanggung, 7 September 1992
Alamat Rumah : Jetis Selopampang Temanggung Jawa Tengah
No. Telp : 081904118841
Nama Orang Tua :
Ayah : Irfanuddin
Ibu : Ma'idah
Jumlah Saudara : 1 (satu)
Anak ke : Pertama
Riwayat Pendidikan :

- SDN Jetis 1
- MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta
- MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Kader PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahamentor
- Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan PMH